



Buletin Parlementaria

Nomor 1000/IV/III/2018 • Maret 2018



UTUT ADIANTO Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR RI



9 772614 339005

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Utut Adianto Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR RI

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Utut Adianto dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Penetapan Wakil Ketua DPR RI ini sesuai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Selain itu, juga berdasar dengan telah diterimanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, untuk menetapkan Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR RI periode sisa masa jabatan 2014-2019.

Sebelum memangku jabatannya, Utut diwajibkan mengucapkan sumpah janji, pengucapan sumpah menurut agama Islam yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali. Sumpah yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” papar Utut dalam sumpahnya yang dipandu Ketua MA, di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

Dalam sumpah Wakil Ketua DPR itu memiliki kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

“Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional,” ucap Utut yang merupakan anggota dewan terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII.

Pengucapan sumpah dibawah kitab suci Al-Quran disaksikan oleh unsur Pimpinan DPR RI dan para anggota DPR dalam Sidang Paripurna. Sumpah yang diucapkan Utut mengandung tanggung jawab untuk memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.

Dengan sahnya Utut menjadi Wakil Ketua DPR, komposisi pimpinan DPR di sisa masa jabatan 2014-2019 yakni Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR, serta lima orang wakil ketua DPR yakni Agus Hermanto (Korinbang), Fadli Zon (Korpolkam), Fahri Hamzah (Korkesra), Taufik Kurniawan (Korekku), dan Utut Adianto. ■ (eko/sf)



Pelemahan Rupiah Bahayakan Industri Ekspor Nasional

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan cukup signifikan dalam dua bulan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan beranggapan, pelemahan nilai tukar rupiah berbahaya bagi industri berorientasi ekspor yang masih mengandalkan bahan baku impor. Sebab, para pengusaha atau industri harus membeli bahan baku dengan biaya yang tinggi.

“Ini menjadi simalakama bagi pengusaha. Mau menaikkan harga jual, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan untuk memangkas biaya produksi. Persoalan ini harus diantisipasi, agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” tandas Taufik dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (19/3).

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta pemerintah mewaspadai pelemahan rupiah agar tidak tembus Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Awal Januari 2018, rupiah masih bertengger di level Rp13.300 per dolar AS. Namun, awal Maret 2018, nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp13.800



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Rumi/rm

per dolar AS.

Sebelumnya, *Senior Director Corporate Ratings Standard and Poor's* (S&P) Xavier Jean mengatakan, rupiah perlu diawasi agar tidak terus anjlok. Menurutnya, depresiasi bisa berlangsung cepat, seperti pelemahan nilai tukar rupiah pada 2015. Saat itu, rupiah melemah dari Rp2.000 ke Rp15.000 hanya dalam hitungan beberapa bulan.

Taufik pun mendorong adanya langkah strategis agar rupiah tidak semakin melemah dan fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat. Misalnya, pemerintah kembali mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan. ■ (eko/sf)

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta pemerintah mewaspadai pelemahan rupiah agar tidak tembus Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Awal Januari 2018, rupiah masih bertengger di level Rp 13.300 per dolar AS. Namun, awal Maret 2018, nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp 13.800 per dolar AS.



UTUT ADIANTO Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR RI

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,

Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,

Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,

Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief

Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,

Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Korn,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Mustaqim, S.Kom.I

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Seminar Nasional 'Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan di Gedung BPK RI

Kapal Asing Pencuri Ikan Seharusnya Diberikan Kepada Rakyat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Ia mengatakan, seharusnya kapal-kapal yang menerobos perairan Indonesia secara ilegal tersebut tidak ditenggelamkan.

Bamsoet, panggilan akrabnya menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, pengolahan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau penenggelaman kapal dan aturan yang ketat bisa memberikan kesejahteraan kepada nelayan kita pasti akan dukung penuh, kalau perlu setiap

hari penenggelaman kapal dilakukan. Saya menilai seharusnya kapal tersebut tidak ditenggelamkan, tetapi diberikan kepada nelayan secara gratis untuk bisa mencari kehidupan" ujar Bamsoet, dalam Seminar Nasional 'Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan' di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (19/3).

Turut hadir dalam Seminar tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, Anggota IV BPK RI Rizal Djalil, Guru Besar IPB Rokhmin Dahuri, serta dihadiri oleh Anggota DPR RI

Komisi IV dan XI, Plt. Gubernur Maluku, Akademisi, dan Asosiasi Perikanan.

Bamsoet menjelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2016 menjelaskan, sejalan dengan amanah Pancasila dan UUD 1945 salah satu bidang perikanan dan kelautan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan penambang garam.

"Sebab selama ini nelayan, pembudidaya ikan dan penambang garam sudah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan



Foto: Jaka/od

ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan,” jelasnya.

Politisi F-Golkar ini juga memaparkan tentang aspek regulasi lain terkait kesejahteraan nelayan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah moratorium izin nelayan untuk kapal asing, pelarangan alat tangkap cantrang, *illegal fishing*, serta terkait pemberdayaan nelayan.

“Perlu suatu perbaikan kebijakan atas implementasi UU agar hak dan kewajiban dari mata rantai ekonomi nelayan yang panjang itu dapat terjamin demi mencapai kesejahteraan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Bamsuet secara langsung meminta Komisi IV DPR RI yang hadir saat itu segera memanggil Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk membicarakan soal kebijakan penenggelaman kapal ini, serta membahas solusi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. ■ (mhr/sf)

DPR Dorong Penelitian dan Pengeboran *Geothermal*

Penelitian dan pengeboran untuk eksplorasi *geothermal* kelak akan dilakukan pemerintah untuk dijadikan dokumen tender. Pengeboran untuk eksplorasi yang berisiko tinggi tak dilakukan lagi oleh pihak swasta atau pemenang tender. Pemerintah akan mengawalinya dengan mengerahkan para peneliti untuk melakukan pengeboran sumber potensi *geothermal* di berbagai daerah.

Demikian diungkap Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menerima pakar *geothermal* dari New Zealand Rosalind Archer di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3). “Nanti hasil penelitiannya itu betul-betul akurat dan dapat dijadikan dokumen tender untuk membantu pelaksanaan tender. Hasil pengeboran dan penelitian yang dimuat dalam dokumen itulah yang akan dibeli para investor pemenang tender untuk mengeksplorasi energi *geothermal*,” tegasnya.

Dengan penelitian dan pengeboran yang dilakukan pemerintah sendiri, diharapkan punya kepastian untuk eksplorasi. Selama ini para investor enggan melakukan penelitian dan pengeboran *geothermal*, karena khawatir gagal dan berbiaya tinggi. Risiko itu, kini ditangani pemerintah, sehingga punya kepastian untuk eksplorasi.

Energi *geothermal*, kata Agus, selain ramah lingkungan, juga merupakan energi yang tak ada habisnya untuk dieksplorasi. Berbeda dengan energi fosil yang akan segera habis dalam jangka waktu 50 tahun ke depan. Untuk tahap awal penelitian dan pengeboran ini, Indonesia masih dibantu para peneliti *geothermal* dari New Zealand.

Ditambahkannya, Indonesia juga sedang menyiapkan infrastruktur riset *geothermal*. Saat ini, proyek uji cobanya dibangun di Waisano, Nusa Tenggara Timur. “Belum ada infrastruktur riset *geothermal*. Tapi kita sudah mulai rintis. Dan uji cobanya sudah kita lakukan di Waisano, NTT. Itu *pilot project* (proyek uji coba) kita. Nanti kita koordinasi dan kumpulkan lagi ahli-ahli *geothermal* Indonesia. Kita yakin Indonesia akan menguasai teknologi *geothermal*,” papar Agus penuh keyakinan. ■ (mh/sc)



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima pakar *geothermal* dari New Zealand Rosalind Archer

Foto: Jaka/od

Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah atau eksekutif.



Foto: Jakarta/od

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Gerakan Kebangkitan Indonesai (GKI)

“Saya mau clear kan ini biar tuntas. Kata ‘setiap orang’ di Pasal 73 ditujukan kepada mitra kerja, bukan rakyat. Konten itu adalah cara kita untuk menjaga agar pelaksanaan tugas DPR tidak ada yang menghambat, itu wajib karena amanah UUD. Jadi itu bukan untuk rakyat, kritik rakyat ke DPR itu tidak ada batasnya,” tegas Fahri saat menerima delegasi Gerakan Kebangkitan Indonesai (GKI) yang dipimpin mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3) kemarin.

Fahri menjelaskan, masyarakat keliru dalam memahami UU MD3, seolah-olah UU MD3 bisa membungkam sikap kritis masyarakat padahal itu mustahil karena tidak ada prosedurnya. Aspirasi seperti ini memang perlu diterima untuk meluruskan kesalahpahaman.

“Waktu itu telah dicantumkan dalam pasal itu ‘setiap pejabat’. Tapi Kementerian Hukum dan HAM mengatakan tidak boleh norma itu pakai setiap pejabat, makanya diganti ‘setiap orang’. Namun setiap orang yang dimaksud bukan rakyat banyak, tetapi mitra kerja kita. Sebentar lagi akan ada hukum acara yang dibuat MKD, yang menjelaskan yang dimaksud ‘setiap orang’

siapa saja, agar tidak ada salah paham,” jelasnya.

Fahri menjelaskan, adanya pasal itu,

sebab akhir-akhir ini, banyak pejabat yang tidak mau hadir jika diundang rapat oleh DPR. Contohnya, KPK yang menolak dipanggil dengan alasan bersifat independen, begitu pula Menteri BUMN yang tidak pernah memenuhi undangan DPR. “Padahal, setiap lembaga negara yang anggarannya dibiayai oleh APBN, wajib datang jika dipanggil DPR sebagai badan pengawas pemerintah,” tambahnya.

Sebetulnya, lanjut politisi asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, DPR itu harus diliberasi dari kungkungan eksekutif. Bila perlu seperti di Amerika Serikat, dimana parlemennya bisa *shut down* pemerintahannya.

Oleh karena itu, Fahri mengajak GKI untuk bekerja sama memberi sesuatu yang lebih besar kepada bangsa Indonesia. “Kalau saya lihat, GKI ini di group WA-nya hari-harinya selalu mikirin rakyat, sementara pejabatnya belum tentu begitu, makanya saya mau melebur, “ imbuhnya.

Kunjungan delegasi yang dipimpin mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto ini memang bermaksud untuk menyampaikan petisi terkait dengan diundangkannya UU MD3. Petisi ini, menurut Prijanto berangkat dari adanya kegelisahan karena ada norma yang dicantumkan dalam UU tersebut, yakni Pasal 73 yang menyatakan bahwa DPR dapat memanggil setiap orang dengan menggunakan Kepolisian Republik Indonesia jika yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat DPR. ■ (mm/sc)

Perlindungan TKI Harus Berbasis Validasi Data

Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) dan pemerintah sepakat dalam perlindungan TKI tidak bisa mengabaikan validasi dan akurasi data kependudukan. Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah menegaskan soal database tentang kewarganegaraan akan segera dituntaskan. Oleh sebab itu, dia menekankan kepada Kementerian Dalam Negeri harus lebih konkret, karena basisnya ada pada proyek e-KTP.

Perlindungan TKI berbasis validasi dan akurasi data warga negara itu menjadi sorotan penting dalam rapat kerja Timwas TKI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa & PDT,

Kementerian Koperasi & UKM, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum & HAM dan Ketua BNP2TKI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).

“Ini terkait pembangunan sistem nasional, jangan sampai bobol sistemnya itu. Bobol dalam pengertian datanya tidak jelas, rakyatnya ada berapa, yang di luar

Fahri Hamzah Lantik Pimpinan MKD

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai masa depan DPR ada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal tersebut diungkapkannya saat melantik Pimpinan MKD Tb. Soenmandjaja di ruang rapat MKD, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).

“Masa depan DPR ada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kelembagaan MKD sebagai sebuah lembaga peradilan etik yang independen adalah satu-satunya cara di seluruh negara demokrasi untuk menjaga agar keanggotaan dewan dan pelaksanaan tugas-tugas dewan yang merupakan representasi dari lembaga yang dipilih oleh rakyat adalah satu-satunya syarat penguatan demokrasi kita, dan wibawa kehormatan DPR kita,” ungkap Fahri dalam acara yang juga dihadiri Wakil Ketua MKD Adies Kadir dan beberapa anggota MKD lainnya.

Sementara itu anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang baru saja secara resmi dilantik dan diserahkan palu sidang, Tb. Soenmandjaja mengatakan bahwa jabatan barunya itu adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak kepada sang khalik.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi selamat kepada Pimpinan MKD yang baru saja dilantik Tb. Soenmandjaja

Foto: Andri/rmi

“Amanah itu bukan penghormatan, tapi lebih kepada pertanggungjawaban. Setiap kita menerima amanah kita kembalikan dulu ke Allah SWT bahwa kepercayaan ini harus berlandaskan profesionalisme. Ditumbuhkan juga motivasi untuk berani mempertanggungjawabkannya. Karena, masalah etika ini masalah Undang-Undang atau di atas hukum,” ujar Tb. Soenmandjaja.

Ditambahkannya, sejak masuk menjadi anggota MKD hingga kini memimpin

lembaga tersebut, Soenmandjaja memegang asas bahwa semua anggota DPR memiliki kedudukan dan terikat dalam peraturan dan tata tertib yang sama. Oleh karenanya ia berharap agar koleganya sesama anggota dewan tidak memiliki kasus. Namun jika pun kemudian kasus tidak dapat terelakan, maka sebagai Pimpinan MKD, ia pun meyakini akan menjaga marwah dan martabat DPR secara keseluruhan, yakni dengan menjalankan undang-undang dan tata tertib yang ada.

■ (ayu/sc)



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memimpin rapat kerja Timwas TKI dengan Pemerintah

Foto: Oji/rmi

negeri ada berapa, yang menjadi pekerja migran ada berapa, di negara, mana ada berapa. Itu semua harus kita update, melacak pekerja kita itu betul-betul tanggung jawab negara. Karena Undang-Undang Dasar kita mengamanahkan melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah,” beber Fahri.

Dari pihak Kemendagri juga menyadari database kependudukan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perlindungan pegawai migran Indonesia. Perwakilan

Mendagri melaporkan, soal database kependudukan, dalam perekaman sudah 97 persen. Selain itu, untuk kepentingan pekerja migran Indonesia, Kemendagri sudah tanda tangan MoU sharing database kependudukan

untuk perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan pemerintah terus melakukan pengawalan, dan mengambil langkah-langkah yang optimal untuk perlindungan pada TKI. Dia menyampaikan di Saudi Arabia ada 102 kasus TKI yang terancam hukuman mati, 79 orang di antaranya berhasil dibebaskan pemerintah dari hukuman mati, ada 3 orang yang telah dieksekusi, dan 20 orang yang sedang dalam proses.

“Jadi intinya pemerintah melakukan langkah yang optimal. Bahkan untuk kasus Zaini Misrin, langkah pemerintah ini sudah *extraordinary*, karena ini menjadi kali pertama kita mengajukan peninjauan kembali dari keputusan yang sudah *inkracht* di tingkat kasasi. Jadi kasus-kasus yang tersisa akan terus ditangani pemerintah,” papar Hanif. ■ (eko/sf)

Jokowi *Offside* Angkat Mensesneg Jadi Koordinator Pencarian Cawapres

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menganggap Presiden Joko Widodo sudah *offside* karena mengangkat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi koordinator pencarian bakal calon wakil presiden tahun 2019 mendatang.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Foto: Iwan Amanias/Od

“Saya pikir, Presiden Jokowi telah bertindak melampaui batas dengan mengangkat Mensesneg menjadi koordinator pencarian bakal calon wakil presiden mendampingi dirinya tahun 2019 mendatang,” kata Mardani, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/3).

Legislator F-PKS itu menuturkan, seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015. “Bukan malah berpolitik praktis! Ini contoh buruk pengelolaan manajemen pemerintah,” ujarnya.

Mardani menuturkan, sudah beberapa kali Presiden Jokowi

Seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2015. “Bukan malah berpolitik praktis! Ini contoh buruk pengelolaan manajemen pemerintah

memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik pribadi.

“Sebelum kasus ini, masih ingatkan postingan akun twitter resmi Kantor Staf

Presiden yang memposting ucapan selamat Presiden Jokowi karena telah dicalonkan kembali jadi presiden di pilpres 2019 oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

Mardani mengaku akan mendalami kasus ini dan berencana melakukan protes hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. “PKS akan mendalami kasus ini dan akan melakukan protes keras,” katanya.

Ia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi ke depan tidak semena-mena memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pribadi. “Akan lebih baik Presiden Jokowi membuat tim eksternal di luar kementerian kabinet yang saat ini masih menjabat,” pungkasnya. ■ (dep/sf)

Harus Ada PP Larangan Gunakan Plastik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha meminta pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk tidak menggunakan produk apapun yang berasal dari bahan plastik, terutama yang paling sering digunakan yakni tas belanja plastik.

“Plastik itu sifatnya tidak mudah di daur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang di setop saja penggunaan plastik. Pantai kita itu banyak sekali tercemar masalah plastik,” ujar Satya sesaat sebelum Sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

Satya melanjutkan, jika itu sudah menjadi PP, misalnya *no plastic pollution* tentunya semua diwajibkan untuk tidak boleh menggunakan plastik. “Selama ini hanya bersifat imbauan. Namanya imbauan, ya bisa dilaksanakan bisa juga tidak. Tapi kalau itu nanti dalam bentuk PP, karena sifatnya multi sektoral, maka kebijakan untuk mengurangi plastik

Selama ini hanya bersifat imbauan. Namanya imbauan, ya bisa dilaksanakan bisa juga tidak. Tapi kalau itu nanti dalam bentuk PP, karena sifatnya multi sektoral, maka kebijakan untuk mengurangi plastik itu pasti bisa masif untuk dilakukan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Satya Widya Yudha



Foto: Cdjle/oci



Saya pernah terlibat langsung dalam mengedukasi sekolah-sekolah dan aksi membersihkan bibir pantai di Tuban yang merupakan dapil saya, yang dilakukan oleh salah satu civil society yang namanya Indonesia Energy and Environment Institut di Tuban. Kita bekerjasama dengan Mangrove Center waktu itu dan hasilnya luar biasa, hanya 4 jam bisa terkumpul sekitar 950 kg sampah

itu pasti bisa masif untuk dilakukan,” jelasnya.

Politisi F-Golkar ini melanjutkan, menurut PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya. Pada tingkat saat ini, pada tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik di lautan daripada ikan.

“Kalau pun ada ikan, plastik itu jadi makanan ikan. Ini tentu menjadi suatu ancaman yang sangat serius. Maka kita meminta sekali lagi kepada pemerintah untuk tidak lagi mengimbau, tapi sudah harus PP no plastic bag,” pinta Yudha.

Satya juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, melalui pemberian

edukasi kepada masyarakat, sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Mengingat 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di pesisir.

“Saya pernah terlibat langsung dalam mengedukasi sekolah-sekolah dan aksi membersihkan bibir pantai di Tuban yang merupakan dapil saya, yang dilakukan oleh salah satu civil society yang namanya Indonesia Energy and Environment Institut di Tuban. Kita bekerjasama dengan Mangrove Center waktu itu dan hasilnya luar biasa, hanya 4 jam bisa terkumpul sekitar 950 kg sampah” ungkap pria dapil Jawa Timur IX ini.

Ia juga mengimbau kepada generasi muda, baik dalam keluarga maupun masyarakat turut berperan aktif dengan menyebarkan pemahaman dan menjadi contoh nyata untuk tidak membuang sampah sembarangan. “Inisiatif seperti civil society tadi itu, kalau bisa dicontoh oleh beberapa daerah. Sehingga dengan begitu, kesadaran dari masyarakat dan siswa-siswa lebih dewasa lagi dalam menyikapi plastik ini,” imbau Satya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini menempati posisi kedua dalam negara-negara yang perairannya mengalami pencemaran dan mencapai 1,29 juta metrik ton per tahun. ■ (mhr/sf)

Bahaya Laten Digital Harus Diberantas

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan mengatakan, pemerintah berperan penting dalam memberantas bahaya laten digital, terutama masih banyaknya situs-situs yang mengandung unsur pornografi. Pasalnya, masih terbukanya akses kepada situs pornografi itu memberikan dampak negatif, khususnya kepada anak-anak.



Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan

Foto: Arief/od

“Bahaya laten digital ini, menurut saya tidak kalah dahsyatnya dampak kerusakan terhadap karakter anak-anak bangsa. Dulu kita susah mengakses internet, karena masih sangat sulit. Tetapi beda sekarang, dimana anak-anak dengan sangat mudah mengakses internet,” ucapnya kepada Parlemen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Nico, selain peran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah memblokir situs-situs yang memiliki unsur pornografi, peran dari orang tua juga harus ditingkatkan untuk mengawasi penggunaan internet pada anak-anaknya.

“Jika suatu saat anaknya

meminjam handphone, terus buka dan menemukan hal yang tidak pantas, itu kan timbul dari kelalaian orang tuanya juga. Peran orang tua harus sangat serius dalam memerangi hal ini terhadap anak-anak,” ujarnya.

Nico menambahkan, pihaknya menginginkan pemerintah untuk melakukan pemblokiran yang lebih ketat lagi terhadap situs-situs yang tidak pantas, serta memberikan hukuman dan membuat jera bagi mereka yang menyebabkan hal-hal tersebut, karena sudah ada peraturan yang mengaturnya.

“Ini kan sudah ada peraturannya jika menyebarluaskan konten yang tidak pantas, maka harus ditindaklanjuti dengan benar dan tegas,” tutupnya.

Sebelumnya, terdapat video yang viral mengenai anak kecil menonton video yang mengandung unsur pornografi. Padahal, di sebelah sang anak tampak seorang ibu yang diduga kuat adalah orang tua dari anak tersebut.

■ (ila/sf)

Komnas HAM Jangan Tunggangi Kasus Novel

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diimbau agar tak menunggangi kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Tim pemantau sempat diusulkan untuk dibentuk. Tapi, kasus ini tak perlu tim pemantau.

Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3). “Kami melihat Komnas HAM menunggangi yang sudah ada, yaitu tim pemantauan kasus Novel. Kita sepakat kasus Novel harus segera diselesaikan. Tapi enggak perlu tim pemantau,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan argumen dan dasar hukum terhadap wacana pembentukan tim pemantau yang melibatkan Komnas HAM itu. Sebaiknya, menurut Arteria, Komnas bisa mendatangi langsung

Kepolisian untuk melihat sejauhmana penyidikan kasus ini yang sudah hampir satu tahun belum terungkap. Komnas bisa memberi masukan atas kasus tersebut.

“Jangan melibatkan banyak pihak lagi yang membuat kasus ini gaduh. Apa sih susahnya Komnas panggil seseorang lalu diantar ke Polisi. Itu lebih elegan daripada ikut membentuk tim pemantau,” ujar Arteria. Ditambahkannya, publik sebetulnya merindukan Komnas HAM yang tampil di masa Orde Baru, berani melawan kekuasaan negara. Sejauh ini belum ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Komnas HAM.

Kasus Talangsari dan tragedi 1965



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

Foto: Rumi/od

adalah dua dari banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. “Komnas belum bisa paparkan hasilnya. Perkembangan apa yang sudah bisa meyakinkan kami. Memang Komnas HAM sudah jalan, tapi belum kami lihat hasilnya,” kilah Arteria lagi. ■ (mh/sc)



Komisi VIII Minta HKBN 2018 Tak Seremonial Semata

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara John Kenedy Aziz mengatakan, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang akan dilaksanakan pada 26 April 2018 mendatang di Manado, diharapkan tidak semata hanya seremonial. Ia mendorong peringatan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat akan risiko bencana.

Demikian disampaikan saat pertemuan antara Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Sulut, Senin (19/3). Salah satu pembahasan dalam pertemuan ini adalah persiapan peringatan HKBN 2018 di Manado, yang akan diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami tidak ingin HKBN ini merupakan acara seremonial saja, karena ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan HKBN ini, kami mendorong agar terus disosialisasikan pentingnya keberadaan BNPB dan BPBD di masyarakat, memacu kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang daerahnya masing-masing,

kemungkinan risiko bencana yang dihadapi daerah, dan bagaimana solusi menghadapi bencana di Indonesia,” kata John.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong agar BPBD Sulut lebih memperhatikan lagi persiapan-persiapan

Salah satu pembahasan dalam pertemuan ini adalah persiapan peringatan HKBN 2018 di Manado, yang akan diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

teknis menjelang HKBN 2018. Di sisi lain, Tim Komisi VIII DPR RI juga mendapatkan aspirasi dari BPBD Sulut yang memerlukan adanya peningkatan-peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPBD.

“Walau masalah anggaran penting, saya juga sempat menegur Kepala BPBD Sulut, karena adanya aset-aset di gudang logistik yang terbengkalai, padahal itu juga mesti dirawat. Karena ini diperjuangkan oleh BNPB, dan menggunakan uang rakyat,” tandas politisi dapil Sumatera Barat ini, usai meninjau sejumlah sarana dan prasarana BPBD Sulut.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, perlunya BPBD Sulut pro aktif dalam mengalokasikan anggarannya lebih terperinci. “Mereka harusnya mengeksplor anggaran BPBD, sehingga akses kecepatan dan kemudahan respon kesiapan bencana di Sulut yang wilayahnya jauh-jauh dan luas, dapat tercover dengan baik,” tandas politisi F-PKB itu. ■ (gd/sf)



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara John Kenedy Aziz berdiskusi dengan Kepala BPBD Sulut

Foto: Guntur/od



Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka

Proyek Milik PGN Harus Diaudit

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai kinerja Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam 5 tahun terakhir menurun. Menurutny hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung dan karena kesalahan strategi manajemen dalam melakukan penempatan investasi khususnya di hulu, yakni Saka Energi Indonesia.

Oleh sebab itu, Rieke menyarankan agar dilakukan audit khusus dan tinjauan lapangan atas proyek milik PGN sebelum pemerintah meneruskan lebih jauh pembentukan *holding* BUMN Migas tersebut. Selain itu dia mengungkapkan, adanya kesalahan strategi manajemen dalam penempatan investasi khususnya di sisi hulu oleh PT. Saka Energi Indonesia, yang merupakan anak usaha PGN.

“Investasi Saka Energi dalam pembelian blok migas pada 2013-2015, sampai saat ini masih mengalami kerugian rata-rata US\$ 50 juta dalam lima tahun terakhir,” kata Rieke dalam keterangan persnya yang diterima Parleментарia, Rabu (15/3).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan lagi, sejak selesai dibangun tahun 2014, FSRU Lampung beroperasi tidak optimal sesuai rencana. Bahkan menurut Rieke cenderung tidak beroperasi sampai saat ini, namun tetap harus membayar sewa sebesar lebih dari US\$ 90 juta. Penyebab utama masalah itu karena tidak adanya kontrak komersial dengan pelanggan khususnya PLN. Mahalnya biaya penyimpanan dan *regasifikasi* juga dianggap menjadi penyebab masalah.

“Ada dua hal yang menekan laba perusahaan, yakni kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa fasilitas *regasifikasi* dan penyimpanan gas,” ujar Rieke.

Dia juga menduga terjadi mark



Foto: Iwan Armanias/od

up dalam proyek FSRU Lampung tersebut. Investasi di hulu (Saka) sampai saat ini masih mengalami kerugian. Rata-rata dalam 5 tahun lebih dari US\$ 50 juta. Untuk itu, dia meminta data laporan keuangan Saka dan pembayaran sewa FSRU Lampung per tahun.

Rieke juga menyoroti pendapatan dan laba PGN yang menurun, padahal dari sisi aset mengalami kenaikan. Pada tahun 2012-2014 penambahan jaringan pipa relatif stagnan, atau hanya 91 km. Namun pertambahan aset naik secara signifikan, yaitu mencapai US\$ 1,7 miliar.

“Berbeda dengan kondisi tahun 2015-2017, dimana penambahan jaringan mencapai 400 km, namun penambahan aset hanya US\$ 350 juta. Penambahan kenaikan aset yang terjadi, penyebab utamanya karena di sebabkan oleh kegiatan pembelian blok migas di hulu melalui Saka Energi Indonesia di tahun 2013-2015,” analisa Rieke. ■ (eko/sf)

Komisi IV Pertanyakan Tambahan Anggaran KLHK

Anggota Komisi IV DPR RI Felicitas Tallulembang mempertanyakan adanya anggaran untuk kegiatan/program penerimaan kunjungan IMF sebesar Rp1 miliar yang ada dalam usulan tambahan anggaran APBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) TA 2018.



Foto: Jayadi/od

Anggota Komisi IV DPR RI Felicitas Tallulembang

“ Dalam laporan Ibu Menteri, khususnya di halaman 54 poin 5 tercantum adanya anggaran untuk penerimaan kunjungan IMF sebesar Rp1 miliar serta beberapa kegiatan IMF lainnya. Apakah ini hanya di bidang LHK saja atau ada di bidang di kementerian lain. Hal itu untuk memastikan anggaran yang keluar tidak tumpang tindih, mengingat jumlahnya yang tidak sedikit,” ujar Felic, begitu ia biasa disapa dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).

Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada Menteri LHK agar apa yang dikeluarkan oleh negara melalui program kunjungan IMF tersebut tidak lebih besar dari apa yang akan diterima Indonesia dari kedatangan lembaga keuangan internasional tersebut ke Indonesia.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono

ini, Felicitas juga melaporkan adanya dugaan pencemaran lingkungan di hulu Sungai Sa'dan akibat penambangan liar. Pencemaran sungai itu tidak hanya membuat air sungai menjadi keruh, namun juga mematikan ikan-ikan yang ada di aliran sungai tersebut. Atas kondisi di dapilnya tersebut, politisi fraksi Partai Gerinda ini berharap Menteri LHK menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas kasus tersebut. ■ (ayu/sc)

Mengingatkan kepada Menteri LHK agar apa yang dikeluarkan oleh negara melalui program kunjungan IMF tersebut tidak lebih besar dari apa yang akan diterima Indonesia dari kedatangan lembaga keuangan internasional (IMF) tersebut ke Indonesia.

Utang Luar Negeri Mengkhawatirkan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir mengatakan, rasio pembayaran utang negara terhadap kemampuan pemerintah sudah mengkhawatirkan. Pasalnya, saat ini besaran Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sudah menyentuh 357,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau tumbuh sebesar 10 persen dibanding tahun lalu.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir

Daripada kita membangun istana pasir, lebih baik membangun ekonomi rakyat, kalau rakyat bisa belanja yakinlah serapan pajak kita lebih dari 13 persen, yang sekarang hanya 10,5 persen dari target kita 11 persen. Sedangkan IMF mengatakan porsi rasio pajak seperti negara kita harus berkisar di angkat 15-16 persen

“Kalau kita bicara APBN 2017, biaya yang paling tinggi adalah untuk infrastruktur yaitu Rp410 triliun. Tapi jangan salah, pembayaran utang kita lebih tinggi, yakni Rp520 triliun. Artinya APBN kita porsinya banyak sekali untuk membayar utang, ini mengkhawatirkan,” kata Hafisz usai menghadiri Seminar Nasional Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (19/3).

Politisi F-PAN itu melanjutkan, hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menekan utang luar negeri tersebut, yakni memperluas pembiayaan terhadap sektor produktif, bukan hanya memfokuskan terhadap infrastruktur semata.

“Saya melihat, pemerintah sudah melakukan pembangunan dari sektor produktif. Tapi kalau dikaji lebih dalam untuk produktivitasnya sampai mana, saya kira ini belum. Karena pembangunan itu bisa dikatakan produktif ketika ia bisa menambah lapangan kerja, bisa meningkatkan daya beli dan industri bisa berjalan normal dan baik,” jelasnya.

Hafisz juga mengatakan pembangunan tidak menasar kepada sektor yang produktif, tidak bersifat membangkitkan industri, membangkitkan UKM yang

bisa memberikan porsi pekerjaan untuk masyarakat. “Selain itu juga, yang paling penting bahwa pembangunan apapun bentuknya harus bisa menggerakkan sektor riil supaya ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen,” ungkapnya.

Politisi dapil Sumatera Selatan I ini juga menjelaskan pembangunan sektor produktif harus juga dipilah supaya setiap rupiah yang digelontorkan dapat mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk rakyat.

“Daripada kita membangun istana pasir, lebih baik membangun ekonomi rakyat, kalau rakyat bisa belanja yakinlah serapan pajak kita lebih dari 13 persen, yang sekarang hanya 10,5 persen dari target kita 11 persen. Sedangkan IMF mengatakan porsi rasio pajak seperti negara kita harus berkisar di angkat 15-16 persen,” imbuh Hafisz.

Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750 per dolar AS). Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. ■ (mhr/sf)



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said berharap target penyelesaian pembangunan Bendungan Paselloeng bisa selesai pada tahun 2019. Dia menyampaikan progres pembangunan bendungan tersebut sangat bagus, penilaian ini didapat setelah Tim Kunjungan Kerja Komisi V melakukan evaluasi menyeluruh pada proses pembangunan Bendungan Paselloeng. Evaluasi bukan hanya menyangkut kontruksi bendungan saja, tapi juga masalah yang terkait pembebasan lahan masyarakat.



Pembangunan Bendungan Paselloreng Didorong Selesai 2019



fotodoe/h/mi

Tim Kunker komisi V DPR RI saat meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng

“Harapannya selain menjadi irigasi sawah-sawah di sekitar, juga sebagai penyedia air bersih untuk seluruh wilayah Kabupaten Wajo,” ujar Muhidin saat memimpin Tim Kunker Komisi V ke mega proyek irigasi di Desa Arajang, Kecamatan Gilirang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Senin (19/3). Dalam kunker ini, turut mendampingi perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah setempat.

Diketahui, proyek tersebut telah menelan biaya sebanyak Rp700 miliar lebih dari APBN di tahun 2015-2019. Selain masalah manajemen konstruksi, pembebasan 1.600 hektar lahan milik warga menjadi sorotan Tim Kunker Komisi V DPR. Pembangunan Bendungan Paselloreng merupakan proyek strategis

nasional yang harus selesai pada tahun 2019.

Mengenai ganti rugi lahan masyarakat yang akan digenangi air bendungan, warga diimbau tenang karena ketersediaan dana tidak masalah, dan sudah ditanggulangi Lembaga Manajemen Aset Nasional

Proyek tersebut telah menelan biaya sebanyak Rp700 miliar lebih dari APBN di tahun 2015-2019. Selain masalah manajemen konstruksi, pembebasan 1.600 hektar lahan milik warga menjadi sorotan Tim Kunker Komisi V DPR.

(LMAN). “Ketersediaan dana tidak ada masalah, tinggal kinerja tim yang mengurus harus lebih giat. Kalau *appraisal* dinilai BPK baik, saya rasa tidak akan ada kendala,” imbuh Muhidin.

Berkenaan dengan keinginan masyarakat yang meminta penyamarataan harga lahan, politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, sudah diadakan pembahasan oleh pihak pengambil kebijakan dari proyek maupun Badan Pertanahan.

“Semua ganti rugi sudah ditangani oleh pihak *appraisal* secara adil, transparan dan sangat terbuka karena dilengkapi dengan fakta dan bukti yang membedakan harga lahan,” kata Muhidin sembari berpesan, sebelum bendungan dioperasikan agar diuji coba terlebih dahulu. ■ (doe/sf)

BNPT Jadi Garda Penanggulangan Terorisme

Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi'i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi garda atau leading sector dalam penanggulangan teroris di Indonesia. Secara umum yang mengkoordinasikan adalah BNPT, dimana ada pejabat eselon dari 36 kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.



Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi'i

Kepada awak media, Syafi'i mengaku saat ini pembahasan RUU sedang berada dalam tahapan konsinyering oleh Tim Perumus (Timus), untuk selanjutnya dibawa ke Panja dan Tim Sinkronisasi (Timsin). "Kita prediksi, sekali konsinyering untuk selesaikan Timus, lalu Timsin dan pada minggu III bulan ini diharapkan selesai," kata politisi F-Gerindra yang akrab dipanggil Romo ini, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3).

Mengenai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, Romo menjelaskan bahwa Pansus tak mau bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan ada keputusan politik. Dan keputusan politik yang permanen akhirnya dipilih Peraturan Presiden (Perpres), dimana presiden membuat peraturan terkait dengan

semua kebutuhan yang diperlukan dalam penanggulangan terorisme.

"Maksud diatur Perpres supaya tetap mengadopsi pasal 7 ayat (2) UU 34 Tahun 2004, maka dalam penyusunan Perpres nanti harus berkonsultasi dulu dengan DPR. Perpres nanti dibuat limitatif, dan diatur harus selesai maksimal setahun setelah UU ini disahkan," jelasnya.

Pelibatan TNI, lanjut Romo, sudah dipahami bahwa TNI akan terlibat hanya di bidang-bidang yang dimiliki, seperti presiden, wapres dan keluarganya, serta kedutaan besar itu menjadi tugas TNI. Kemudian di kapal, pesawat, dan di zona eksklusif oleh TNI, itu yang akan diatur dalam sebuah peraturan. Itu yang bakal menjadi Perpres, sebagian akan dimasukkan dalam penjelasan.

Sebelumnya, pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris Bawah Kendali Operasi (BKO) sekarang secara fungsional

memiliki tugas pemberantasan teroris, karena itu bagian dari operasi militer selain perang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34 Tahun 2004.

"Karena kita ingin penanggulangan teroris itu dalam satu UU, maka keterlibatan TNI diatur secara detail dalam Perpres," kata anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan. ■ (mp/sf)

DPR Desak Pemerintah Revisi UU Narkotika



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo bersama Anggota Komisi III M. Nasir Djamil sebagai pembicara pada diskusi Forum Legistasi "Urgensi Revisi UU tentang Narkotika"

Sulteng Siap Laksanakan UNBK

Komisi X DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran 2017/2018 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang akan berlangsung serentak awal April 2018 mendatang.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin Tim Kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulteng

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi

X DPR RI bertemu dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng dan Kepala Sekolah SMA/SMK di Palu, Sulteng, Rabu (21/3).

"Komisi X patut memberikan penghargaan atas kesiapan Sulteng melaksanakan UNBK tingkat SMA dan SMK pada tahun 2018 ini. Apalagi pada tahun 2017 lalu baru SMK yang 100 persen sudah melaksanakan UNBK, dan SMA hanya 80 persen saja," kata Ferdi, panggilan akrabnya, mengutip informasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng.

Ferdi menambahkan, dari hasil kunjungan ke dua sekolah di Palu, yakni SMA Swasta Berdikari dan SMK Swasta Justitia, pihaknya sangat terkesan karena masing-masing sudah menyatakan siap 100 persen untuk melaksanakan UNBK.

Meskipun ada sekolah yang masih bergabung dengan sekolah lain yang memiliki fasilitas tempat maupun komputer yang memadai.

"Meski hanya mengunjungi dua sekolah, tetapi dari hasil pengamatan dan informasi dari Kadinas Sulteng, semua sekolah SMA maupun SMK di 13 kabupaten, kota dan provinsi seluruhnya siap melaksanakan UNBK," apresiasi politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut Ferdi menjelaskan, pihaknya juga mendengar laporan dari PT. PLN maupun PT. Telkom Kota Palu. Keduanya menjamin listrik selama pelaksanaan UNBK. Begitu halnya dengan jaringan internet, sudah dipersiapkan dengan matang

"UNBK tentu sangat berbeda dengan Ujian Nasional menggunakan kertas atau tertulis karena jantungnya adalah listrik dan jaringan internet," imbuh politisi dapil Jawa Barat itu. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyambut baik kedatangan Tim Komisi X DPR RI. ■ (hr/sf)

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang tentang Narkotika, sejalan dengan perkembangan dan kecanggihan kejahatan narkotika global. Kalau tidak, maka DPR RI siap mengambil alih revisi UU tentang Narkotika tersebut.

“Jadi, DPR siap mengambil alih inisiatif revisi UU Narkotika, jika pemerintah belum mengirimkan. Sebab, UU Narkotika sudah sangat mendesak untuk segera diperbarui guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba,” tegas politisi Golkar itu dalam forum legislasi ‘Urgensi Revisi UU tentang Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal’ bersama anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil di Media

Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Firman, UU tentang Narkotika saat ini sudah jauh ketinggalan dan lemah. Padahal pemerintah sudah menyerukan soal Indonesia darurat narkoba. Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan naskah perubahan revisi UU tentang Narkotika tersebut. “Meningat sudah memasuki tahun politik, dan jika tidak selesai maka akan tertunda,” kata Firman.

Yang penting dalam revisi tersebut diharapkan aparat kepolisian maupun BNN yang terbukti melakukan ‘permainan’ kejahatan narkoba harus dikenai sanksi hukum.

“Di berbagai operasi narkoba ada oknum yang sengaja menjebak korban. Baik melalui jok mobil, motor, tas dan sebagainya sebagai alat pemerasan. Ini yang belum tersentuh hukum,” jelas Firman. ■ (sc)

UU tentang Narkotika dan Psicotropika saat ini sudah jauh ketinggalan dan lemah. Padahal pemerintah sudah menyerukan soal Indonesia darurat narkoba. Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan naskah perubahan revisi UU tentang Narkotika tersebut





Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat meninjau kelas dan melihat secara langsung proses kerja penyelenggaraan UNBK di Provinsi Kaltim

FotoDep/mi

Pelaksanaan UNBK di Kaltim Hanya 50 Persen

Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur baru dapat dilaksanakan sebesar 50 persen saja, yakni dilakukan oleh sekitar 48 ribu siswa tingkat SMA dan SMK, serta 58 ribu siswa pada tingkat SMP.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai menggelar pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan UNBK di Provinsi Kaltim.

“Secara prinsip Provinsi Kalimantan Timur siap melaksanakan UNBK, meski baru mencapai 50 persen. Kita juga mengecek kesiapan pihak-pihak lain seperti PLN dan Telkom dalam pelaksanaan UNBK di Kaltim. Dari segi daya sudah siap, tetapi kalau ada kejadian yang diakibatkan karena faktor cuaca,

maka PLN tidak bisa menjamin,” ucap Fikri di Kota Balikpapan, Kaltim, Rabu (21/3).

Sementara itu, pihak Telkom justru berani menjamin terkait berbagai kesiapan yang telah dilakukannya dalam menghadapi UNBK, sambung Fikri. “Mereka menjamin, ketika ada daerah yang *blank spot*, akan dibantu dengan menggunakan satelit,” terang politisi F-PKS itu.

Fikri menegaskan, persoalan yang menjadi catatan Komisi X dari Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur ini, sama dengan yang dialami oleh daerah-

Secara prinsip Provinsi Kalimantan Timur siap melaksanakan UNBK, meski baru mencapai 50 persen. Kita juga mengecek kesiapan pihak-pihak lain seperti PLN dan Telkom dalam pelaksanaan UNBK di Kaltim.

daerah lainnya, yakni masalah sarana dan prasarana (sarpras) yang ada.

“Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan sarpras adalah dengan menerapkan pembagian sistem *shift* atau bertahap. Meski hal tersebut berpotensi rawan akan terjadinya kebocoran soal-soal ujian saat terjadi pergantian *shift* itu,” kata Fikri. ■ (dep/sc)



Perlu Sinergitas Pemerintah Sukseskan UNBK di Siak

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menuturkan perlunya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Diketahui secara umum, UNBK tingkat SMA tahun 2018 di Provinsi Riau rata-rata masih di bawah 50 persen. Disparitas antar kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK relatif tinggi. Dari 12 (dua belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 2 (dua) kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK mandiri lebih dari 70 persen.

Pertama, di Kota Pekanbaru melaksanakan UNBK mandiri 75 persen, bergabung dengan sekolah lain 11 persen, dan sisanya 19 persen dengan non UNBK (UNKP : Ujian Nasional Kertas dan Pensil). Kedua, di Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan UNBK mandiri 71 persen, dan sisanya 29 persen melaksanakan UNKP.

Berbeda dengan UNBK tingkat SMA, pelaksanaan UNBK tingkat SMK tahun

2018 di Provinsi Riau secara rata-rata 70 persen melaksanakan secara mandiri. Hanya di Kabupaten Kampar yang melaksanakan UNBK mandiri di bawah 50 persen. Bahkan, dari 12 (dua belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, 6 (enam) diantaranya melaksanakan UNBK, meski sebagian bergabung dengan sekolah

Sekarang ini butuh koordinasi oleh pemerintah daerah dan pusat. Kepada Kemendikbud perlu dicarikan cara agar ketertinggalan di Kabupaten Siak ini bisa diimbangi dan mengejar daerah lain

lain. Dan di Kabupaten Rokan Hulu hampir 90% melaksanakan UNBK secara mandiri.

Khusus untuk Kabupaten Siak tergambar di tingkat SMA, UNBK mandiri 20 persen, UNBK gabung 8 persen, dan Non UNBK 72 persen. Sedangkan tingkat SMK, UNBK mandiri 66,67 persen, UNBK gabung 25 persen, dan Non UNBK 8,33 persen.

Atas tingginya ketimpangan ini, politisi Demokrat ini mendorong dilakukan koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah agar UNBK dapat berjalan dengan lancar.

“Sekarang ini butuh koordinasi oleh pemerintah daerah dan pusat. Kepada Kemendikbud perlu dicarikan cara agar ketertinggalan di Kabupaten Siak ini bisa diimbangi dan mengejar daerah lain,” ujar Djoko usai pertemuan dengan Asisten I Bupati Siak, di Kantor Bupati Siak Riau, Rabu (21/3).

Saat melakukan peninjauan di SMK 1 Kabupaten Siak misalnya, masih ditemukan sarana dan fasilitas yang kurang layak seperti minimnya jumlah komputer, sering padamnya listrik dan ruangan AC yang terbatas.

Usai kunjungan ini diharapkan terjalin sinergitas yang baik dalam menyukseskan pelaksanaan UNBK yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Komisi X juga akan menyampaikan temuan ini saat Rapat Kerja dengan Mendikbud nantinya. ■ (hs/sc)



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto bersama Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau

Foto Hendra/m

Komisi IX Pertanyakan Kerja Diplomatik KBRI di Arab Saudi

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan kinerja diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi. Pasalnya eksekusi hukuman mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Muhammad Zaini Misrin berlangsung tanpa notifikasi dan dinilai mengabaikan mekanisme prosedur diplomatik dalam penanganan eksekusi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Tentu yang jadi pertanyaan adalah apakah perwakilan kita pro aktif di sana? Kok bisa sampai jadwal eksekusi tidak tahu,” tanya Dede dalam keterangan persnya kepada Parleментарaria, Selasa (20/3).

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini mendesak Pemerintah RI untuk melayangkan nota protes ke Saudi atas kasus eksekusi mati TKI yang tanpa pemberitahuan ini. Soal kerja diplomatik perwakilan RI di Saudi, dia memandang perlu ada perbaikan. “Rasanya Pak Dubes kita perlu kembali lakukan komunikasi mendalam kepada Arab Saudi,” ujar Dede.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago akan mengusulkan kepada Komisi IX DPR agar meminta klarifikasi kepada



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi (F-PD) dalam konferensi pers masalah eksekusi hukuman mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap TKI bernama Muhammad Zaini Misrin

seluruh pemangku kepentingan dari pihak pemerintah. Baik itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), setelah Zaini Misrin dieksekusi mati Arab Saudi.

“Kami akan meminta klarifikasi, baik pada Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Irma menilai, komunikasi bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi tidak berjalan baik, padahal Presiden Joko Widodo telah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada Raja Salman untuk meminta

penundaan eksekusi tersebut. Namun, permintaan itu tidak digubris oleh otoritas Saudi.

Sebagaimana diketahui, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin telah dihukum pancung oleh

Pemerintah Arab Saudi pada Minggu (19/3) lalu. Dia dieksekusi mati terkait kasus dugaan pembunuhan. Otoritas Saudi sama sekali tidak memberi tahu terkait eksekusi tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi pada 2004. Namun, Pemerintah Indonesia baru diberi tahu mengenai status hukumnya pada 2008 ketika pengadilan Arab Saudi sudah menjatuhkan vonis hukuman mati. Zaini sendiri menyangkal telah membunuh majikannya. Diduga, ia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya oleh pihak kepolisian maupun penerjemah yang dihadirkan saat itu. ■ (eko/sf)

Untuk Perkuat Fungsi, DPR Perlu Penambahan Anggaran

Mewujudkan lembaga yang modern, terpercaya dan kredibel dibutuhkan penguatan kelembagaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mensosialisasikan Kebijakan Kerumah Tanggaan Dewan dengan tema ‘Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2015-2019’ di Universitas Sumatera Utara, Medan.



Ketua BURT DPR Anthon Sihombing bersama Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar saat melakukan Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara, Medan

Ketua BURT DPR Anthon Sihombing berharap dalam sosialisasi ini, mendapatkan masukan untuk penyusunan Renstra 2019-2024. "Dalam memperkuat lembaga DPR, visi atau Rencana Strategis (Renstra) DPR ke depan kita akan berupaya memperkuat lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang modern, terpercaya dan kredibel," tutur Anthon di Universitas Sumatera Utara, Medan, Rabu (21/3).

Berbagai masukan dari Universitas Sumatera Utara akan dijadikan sebagai langkah awal untuk penyusunan program periode DPR yang akan datang dalam upaya memperkuat fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Dalam FGD di Universitas Sumatera Utara tersebut juga dibahas anggaran yang didapat DPR hanya 0,26 persen, diharapkan nantinya DPR mendapatkan idealnya minimal satu persen dari total APBN sehingga bisa menguatkan kinerja dan fungsi DPR.

Senada dengan Anthon dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar menyatakan penguatan tiga fungsi DPR yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi dirumuskan dalam rencana strategis DPR.

"Bahwa penguatan DPR ini dalam tiga hal yaitu fungsi pengawasan, anggaran dan fungsi legislasi yang akan dirumuskan dalam renstra di depan, bagaimana mewujudkan kekuatan DPR, realisasi dalam pengawasan dan yang terakhir seperti apa wujudnya kekuatan DPR dalam bidang legislasi dengan output pembuatan Undang-Undang," tutur politisi PPP itu.

Sementara itu, anggota BURT DPR RI Muslim menuturkan untuk memperkuat kinerja DPR juga dibutuhkan peningkatan jumlah anggaran, anggaran pada tahun 2017 yang tidak mencapai satu persen dari total APBN dinilai masih kurang.

"Ketika kita melihat anggaran DPR dengan BI pasti sangat jauh sekali, yang kita dapat tidak mencapai satu persen dari total APBN, persoalan lain adalah bagaimana DPR ini dapat bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi dapat berjalan dengan baik," tutur politisi Demokrat tersebut. ■ (rh/sc)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama Anggota DPR RI Michael Wattimena, Plt. Sekjen DPR RI Damayanti dan Pejabat Setjen DPR lainnya, usai membuka Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ambon

Foto: Arief/rmi

Wartawan Parlemen Dukung Sukseskan Ambon Jadi Kota Musik Dunia

Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menyatakan, Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen diharapkan mampu meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan antara Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, Pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dengan wartawan.

“ Kita selalu meminta masukan dari wartawan untuk tujuan perbaikan DPR ke arah yang lebih baik. Setjen selaku *supporting system* harus senantiasa meningkatkan kerja sama DPR dengan wartawan. Kami selalu terbuka terhadap saran dari wartawan,” ungkap Damayanti dalam sambutannya dalam acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kota Ambon, Sabtu (17/3).

Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kota Ambon ini mengusung tema ‘Sinergi DPR dan Wartawan Parlemen Menyukseskan Ambon Sebagai Kota Musik Dunia’. “Tema ini kita usung dalam rangka mendukung dan mensukseskan penancangan Ambon menjadi Kota Musik Dunia Tahun 2019,” ungkapnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ambon telah sukses menyelenggarakan Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebis 2018 selama 3 hari pada peringatan Hari Musik Nasional beberapa hari yang lalu.

Damayanti juga berharap Koordinatoriat Wartawan Parlemen turut serta dalam menyukseskan penancangan Ambon sebagai Kota Musik Dunia, salah satunya dengan penyebarluasan pemberitaan terkait penancangan tersebut.

“Kita berharap, wartawan yang turut dalam kegiatan ini bisa turut serta menyebarkan pemberitaan penancangan Ambon sebagai Kota Musik Dunia ini dan potensi-potensi yang ada di kota yang sangat indah ini,” ujar Damayanti.

Kegiatan Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, sekaligus meresmikan Studio Rekaman Musik Internasional Ambon dan Gedung Pertemuan Musik Etnik di Universitas Pattimura. ■ (skr/sc)

Michael Wattimena Minta Pers Dukung Ambon Sebagai Kota Musik Dunia

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga putra Maluku Michael Wattimena berharap agar insan pers nasional ikut mendukung Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia dan tercatat dalam agenda UNESCO.

“Seperti kita pahami, kalau Kota Ambon sudah masuk di dalam rangkaian agenda UNESCO, maka akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Ambon,” ucap Michael saat memberikan sambutan pada acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kota Ambon, Maluku, Jum'at (16/3).

Dengan dijadikannya Kota Ambon sebagai *City of Music* yang masuk dalam kalender UNESCO, hal tersebut dapat melipatgandakan kehadiran pengunjung untuk melihat aktivitas seni yang ada di Kota Ambon Manise, sambungnya.

“Beta lahir di Maluku, walaupun selama dua periode dari dapil Papua Barat. Beta lahir di salah satu desa di Kabupaten Maluku Tengah, hingga masa kuliah. Baru pada tahun 2003 bermigrasi ke Jakarta,” terang politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Michael menyampaikan, dengan kehadiran insan pers di Kota Ambon, diharapkan akan dapat lebih mengenalkan potensi seni budaya masyarakat Provinsi Maluku secara lebih luas lagi pada dunia luar.

“Maluku merupakan salah satu provinsi yang punya andil besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, namun patut disayangkan potret wajah pembangunan dari Provinsi Maluku tidak

sama majunya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia yang berperan sama dalam memperjuangkan NKRI,” tuturnya.

Michael sangat mengapresiasi kegiatan Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang dilaksanakan di Kota Ambon. Ia juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy, atas sikap penerimaan yang sangat baik dan tulus dalam menjamu kehadiran rombongan dari Setjen DPR RI dan insan media yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen. ■ (dep/sf)



Wakil Ketua Komisi IV Michael Wattimena bersama Pejabat Pemerintah Daerah hadir pada acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan parlemen di Ambon

Sibu-Sibu Sambut Hadirnya Ketua DPR di Kota Ambon

Lagu Sibu-Sibu mengalun merdu mengiringi kedatangan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Lapangan Udara Pattimura Ambon, Maluku, Sabtu (17/3). Angin 'Kota Ambon Manise' pagi itu bertiup sepoi-sepoi menyambut hangat kehadiran Bamsoet, sapaan akrabnya, seperti makna sibu-sibu yang berarti sepoi-sepoi.

maupun Pemerintah Daerah. Sebab itu, pembahasan RUU tentang Permusikan diharapkan dapat menjadi satu kepastian regulasi yang jelas dan spesifik terkait dengan musik," tutur Bamsoet.

Bamsoet menilai potensi masyarakat

Ambon terhadap seni sangat besar. Tak heran jika Ambon adalah kota yang kaya dengan penyanyi dan musisi.

"Ambon Manise yang berarti Ambon yang manis dan cantik, bukan hanya sekadar slogan saja. Saya sudah buktikan pagi ini. Begitu sampai di Bandara Pattimura, kita sudah disuguhkan penampilan musisi dengan musik yang sangat indah," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini berharap, masyarakat Ambon dan para pelaku musik selalu aktif memberikan dukungan serta masukan kepada Pemkot Ambon, Pemprov Maluku, maupun pemerintah pusat dan DPR. Dialog, public hearing, maupun penyelenggaraan berbagai event sangat diperlukan.

"Kerja sama semua pihak adalah kunci utama menyukseskan berbagai program kerja menuju Ambon Kota Musik Dunia. Melalui kerja sama yang baik dan didukung rekan-rekan media, saya yakin sebentar lagi akan terwujud harapan kita semua. Ambon Kota Musik Dunia, bukan hanya kebanggaan masyarakat Ambon, tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia," pungkas Bamsoet.

Diakhir acara, Bamsoet tak lupa melantukan dua bait pantun.

*Menonton bola duduk di balkon
Makan roti minum teh tarik
Saya sengaja datang ke Ambon
Kota Ambon indah sangat menarik*

*Sarang lebah gantung di pohon
Boleh dilihat jangan diusik
Beramai-ramai datang ke Ambon
Nikmati Ambon kota musik dunia yang asyik* ■ (dep/sf)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai meresmikan Studio Rekaman Internasional di Universitas Pattimura, Ambon, lanjut foto bersama dengan peserta Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen

Tiada kata hari libur bagi Bamsoet. Ditengah kesibukan sehari-hari sebagai Ketua DPR, di akhir pekan pun masih banyak kegiatan yang harus dihadiri. Sabtu pagi ini pun, Bamsoet menghadiri acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang mengangkat tema 'Sinergi DPR RI, Pemerintah RI, Pemkot Ambon dan Wartawan Parlemen Menyukseskan Ambon sebagai Kota Musik Dunia', di Kota Ambon, Maluku.

"Ini konsekuensi jabatan saya sebagai Ketua DPR. Setiap hari, sejak saya bangun tidur hingga mau tidur lagi, sudah tersusun jadwal kegiatan yang harus saya hadiri. Sabtu-Minggu pun kerap banyak acara yang harus saya hadiri. Buat saya itu bukan beban. Saya *happy* menjalani apa yang menjadi tugas dan amanah saya sebagai Ketua DPR," papar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini hadir ke Kota Ambon untuk menyukseskan Ambon

sebagai Kota Musik Dunia. Bamsoet berjanji DPR akan memberikan dukungan baik dari segi legislasi, anggaran, maupun menjembatani koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"DPR sangat siap membantu dalam segi apapun. Saya minta Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku segera mengirimkan dokumen terkait agar DPR bisa merumuskan langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menyukseskan Ambon sebagai Kota Musik Dunia," ujar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi, telah menyepakati untuk memasukkan RUU tentang Permusikan ke dalam Prolegnas 2015-2019. Hal ini didasari argumentasi bahwa musik adalah salah satu aset bangsa yang beranjak dari akar budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Keragaman musik dan kreativitas dari para pelaku musik merupakan suatu potensi ekonomi bagi Pemerintah Pusat



Anggota DPR RI, Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali disaksikan oleh Pimpinan DPR dari ki-ka: Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Bambang Soesatyo, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah. FOTO : JAKA/RNI



Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korekku Taufik Kurniawan menggelar pertemuan dengan Parlemen Yunani dalam rangka Kunjungan Muhibah ke Republik Yunani. FOTO : IWAN ARMANIAS/RNI



Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS), didampingi Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Fadli Zon (F-Gerindra) saat hadir di acara 'Ngopi Bareng Fahri Jilid ke-8' di Yellow Truck Coffee, Kota Bogor.

FOTO: NAEFURODJI/RNI